

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dibanding makhluk ciptaan lainnya. Sejatinya, manusia merupakan makhluk monodualisme yang memiliki arti bahwa sebagai makhluk hidup individu sekaligus makhluk individu. Pada dasarnya manusia memiliki keinginan dilahirkan dengan kondisi fisik yang normal dan sempurna, namun pada kenyataannya ada manusia yang tidak mendapatkan kesempurnaan karena adanya keterbatasan seperti kecacatan fisik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental. Latar belakang timbulnya disabilitas bermacam-macam seperti masalah kesehatan yang ada sejak lahir, penyakit kronis ataupun cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan sebagainya. Akibatnya, terdapat istilah untuk para penyandang cacat selama ini mengacu kepada kondisi seperti ketidakmampuan ataupun kelemahan yang memiliki stigma negatif.

Pemerintah sudah membuat pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk jaminan agar mereka terhindar dari diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan hak-hak untuk para penyandang disabilitas ini untuk hidup layak seperti manusia normal. Hak-hak tersebut seperti hak hidup, bebas dari stigma, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik hingga pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Undang-undang ini menggunakan pendekatan dengan melihat isu disabilitas yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah individu tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individual dan lingkungan.

Dalam memastikan kebijakan hingga berjalannya program dari UU tersebut tanggung jawab koordinasi ini diberikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Pada tingkat daerah, instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas yaitu pemimpin daerah. Selain itu juga terdapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Adapun beberapa daerah yang sudah memiliki aturan atau peraturan daerah tersendiri yang spesifik terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan keseriusan masing-masing pihak dalam pemenuhan serta memperjuangkan hak-hak disabilitas. Kalimantan Barat salah satu provinsi yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas. Hal ini dilihat dari Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang hingga Perda yang disebutkan di atas sudah terbentuk sejak lama, namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat banyak kendala dalam penerapan terhadap aksesibilitas hingga hak-hak yang masih sangat prihatin. Stigma negatif yang melekat pada masyarakat inilah yang biasanya menjadikan penyandang disabilitas seperti mendapatkan diskriminasi berupa dipinggirkan, pelecehan maupun pengucilan dari lingkungan yang langsung maupun tak langsung. Menurut analisis yang dilakukan oleh SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*) karena stigma buruk tersebut membuat rendahnya keberdayaan dan memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi dalam pembangunan hingga akses terhadap berbagai layanan publik. Rendahnya keberdayaan penyandang disabilitas ini muncul akibat persoalan di tingkat lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, guru hingga ke masyarakat yang lebih luas. Ketika berinteraksi dengan masyarakat, penyandang disabilitas sering diremehkan dan tidak dihargai martabatnya sebagai manusia.

SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*) juga mencatat bahwa para penyandang disabilitas di Indonesia memiliki kesejahteraan yang lebih rendah daripada warga nondisabilitas. Disaat angka kemiskinan di Indonesia telah berhasil mencapai satu digit pada tahun 2018, proporsi penyandang disabilitas yang hidup dibawah kemiskinan sekitar 14,97 %. Hal ini karena penyandang disabilitas memiliki beban pengeluaran yang lebih besar daripada warga nondisabilitas, akibatnya angka kemiskinan penyandang disabilitas pun menjadi lebih rendah. Kondisi kesejahteraan yang rendah itupun tidak terlepas dari akses terhadap

pekerjaan yang sangat rendah pula. Menurut Susenas dalam SMERU, di tahun 2018 mayoritas penyandang disabilitas usia produktif tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya 31,63% yang tentunya lebih rendah dari TPAK nondisabilitas yang mencapai 68,32%.

Kesulitan bagi penyandang disabilitas mendapat pekerjaan formal yaitu mereka terhambat oleh kualifikasi yang dipasang oleh beberapa perusahaan yang mengakibatkan kandidat penyandang disabilitas tersebut akan tersingkir oleh nondisabilitas. Maka dari itu, SMERU mencatat bahwa 57,07% pekerja dari penyandang disabilitas bekerja dengan cara membuka usaha sendiri yang bersifat informal dan pekerja disabilitas yang bekerja sebagai buruh atau karyawan formal hanya 22,25%. Wirausaha akhirnya menjadi pilihan pekerjaan banyak penyandang disabilitas. Namun hal tersebut memiliki kendala seperti keterampilan hingga pendanaan. Keberadaan untuk pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas dan tidak rutin, akibatnya serapan peserta pelatihan di lapangan pun terbatas.

Menurut Dinas Sosial Kota Pontianak, pada tahun 2021 penyandang disabilitas di Kota Pontianak berjumlah 1.161 orang dengan 12 ragam disabilitasnya. Jenis penyandang disabilitas terbanyak yaitu cacat fisik yang berjumlah 276 orang. Dari total jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pontianak, hanya 34 orang yang memiliki pekerjaan sedangkan yang lainnya menganggur. Data tersebut sangat prihatin mengingat bahwa Pontianak merupakan Ibu Kota Kalimantan Barat. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari minimnya pelatihan keterampilan yang mengakibatkan jumlah pengangguran penyandang disabilitas cukup banyak.

Untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan hak-hak yang layak serta menjadi peningkat kualitas hidup bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak, perlunya fasilitas untuk mewadahi kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, perlunya perancangan sebuah pusat pelatihan kerja dan keterampilan untuk penyandang disabilitas jenis cacat fisik. Kehadiran sebuah pelatihan kerja dan keterampilan ini juga mendukung hak penyandang disabilitas yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 yaitu hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta tanpa Diskriminasi, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.

1.2 Rumusan Masalah Perancangan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.

1.3 Tujuan Perancangan

Tujuan yang ingin dicapai pada perancangan ini yaitu menghasilkan rancangan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.

1.4 Sasaran Perancangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam membuat suatu landasan konseptual perencanaan dan desain Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak yaitu melakukan studi terhadap :

- Mampu menjelaskan elemen desain untuk perancangan bagi penyandang disabilitas.
- Mengidentifikasi karakter pelaku kegiatan.
- Mengidentifikasi karakteristik aktivitas pada ruang yang dibutuhkan.
- Mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan.
- Mengidentifikasi studi literatur tentang perencanaan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.
- Menentukan lokasi dan menganalisis tapak perancangan.
- Merumuskan program ruang Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.
- Membuat gambar konsep Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.
- Membuat gambar pra-rancangan dan gambar kerja beserta detail Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak.

1.5 Lingkup Perancangan

Lingkup perencanaan dan perancangan yang akan dibahas pada Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak difokuskan pada :

- Lokasi perancangan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik berada di Kota Pontianak.
- Fungsi dan fasilitas yang terdapat pada perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak terkait dengan aktivitas dan kegiatannya.

1.6 Metodologi Perancangan

1.6.1 Keaslian Perancangan

Perancang	Judul Perancangan	Fungsi	Metode Perancangan	Lokasi Perancangan
Ester Devita (2017)	Pusat Pelatihan Kerja Penyandang Cacat Fisik di Kota Pontianak	Pusat Pelatihan Kerja untuk Penyandang Cacat Fisik	Menggunakan metode dengan pendekatan konsep yaitu aksesibilitas yang digunakan untuk kebutuhan khusus bagi penyandang cacat fisik di Kota Pontianak. Asas Aksesibilitas ini sesuai dengan Undang-Undang No.4 Pasal 1 ayat 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.	Jalan Selat Panjang, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara
Fala Keena Khoirunnisa (2017)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder • Data dianalisis untuk ditemukan permasalahan dan mencari penyelesaian dengan melakukan pemrograman • Menerapkan konsep ke 	Jalan Mr. Koesbiyono Tjondrowibowo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang

			<p>bangunan dengan mempertimbangkan hasil Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan desain dilakukan sebagai finalisasi perancangan 	
--	--	--	--	--

Sumber : Penulis, 2021

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul “Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak”. Perbedaan antara perancangan ini dengan perancangan sebelumnya terletak pada waktu, lokasi, fungsi serta pendekatan.

1.6.2 Pendekatan Perancangan

Pada Perancangan Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pontianak menggunakan pendekatan desain arsitektur biofolik yang menekankan pada aksesibilitas untuk menunjang kegiatan serta kebutuhan pelaku utama yaitu penyandang disabilitas.

1.6.3 Metode Perancangan

Metode perancangan merupakan alat untuk mengetahui sesuatu melalui tahapan-tahapan sistematis. Tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut :

- Tahap Gagasan

Tahap gagasan merupakan tahap persiapan untuk memulai pekerjaan secara keseluruhan. Tahap ini dimulai dari penentuan judul serta prinsip umum penulisan karya ilmiah seperti latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan lingkup.

- Tahap Tinjauan Teori

Tahap ini berisi tentang tinjauan serta standar sarana dan prasarana tentang Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik. Tahapan tinjauan teori juga berisi mengenai kajian teori tentang Pusat Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Penyandang Disabilitas Fisik, lokasi perancangan serta faktor-faktor perencanaan dan perancangan.

- Tahap Pengumpulan Data

Dalam perancangan ini menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data. Dua metode yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui proses pengambilan data secara langsung pada lokasi, dengan cara :

- A. Survei Lapangan (Observasi)

Survei lapangan dilakukan untuk dapat mengidentifikasi suatu tempat atau lokasi tapak perancangan. Selain itu untuk mendapatkan referensi data yang jelas dan mengetahui keadaan tentang wilayah sekitar lokasi tapak perancangan. Hasil dari survei lapangan seperti :

- Luas site
- Batasan site
- Kondisi kontur site
- Kondisi sekitar site
- Kondisi vegetasi dan drainase pada tapak
- Kondisi iklim pada tapak
- Sirkulasi pada tapak
- Studi kelayakan pada tapak

- B. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi lebih tentang masalah-masalah yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam desain. Sehingga hasil rancangan dapat sesuai konteks dengan kondisi tapak.

- C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dapat memperkuat data tentang bagaimana kondisi tapak. Dokumentasi berhubungan dengan penyimpanan data secara visual atau terkait data yang sudah didapat. Hal ini dilakukan agar data yang telah didapat tersusun dengan sistematis dan berguna untuk proses desain.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut dapat berupa studi Pustaka atau literatur. Berikut adalah penjelasannya.

A. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan pengumpulan data tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek serta pendekatan perancangan yang dapat diperoleh dari ahli serta kebijakan pemerintah setempat. Data-data tersebut berasal dari berbagai sumber yang ada di buku, jurnal, website serta peraturan pemerintah. Data-data tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat dan memperdalam analisis perancangan.

- Tahap Teknis Analisis

Teknis analisis berisi pembahasan dalam factor yang mempengaruhi perencanaan dan desain. Proses tahapan analisis dari perancangan ini meliputi :

1. Analisis Fungsi

Analisis fungsi digunakan untuk menentukan fungsi apa saja yang ada pada rancangan. Setelah itu, analisis fungsi digunakan untuk menjabarkan pengguna, aktivitas dan ruang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, fungsi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi fungsi primer, fungsi sekunder dan fungsi penunjang. Dengan analisis ini diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ruang yang sesuai dengan fungsi yang ada di perancangan.

2. Analisis Aktivitas dan Pengguna

Analisis aktivitas dan pengguna disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang telah dijabarkan. Analisis ini dilakukan untuk menemukan pola aktivitas dan pengguna yang ada di dalam maupun luar bangunan. Analisis aktivitas dan pengguna nantinya dapat menghasilkan kebutuhan seperti besaran, sirkulasi serta dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kegiatan analisis ruang.

3. Analisis Ruang

Analisis ruang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan dan persyaratan ruang pada bangunan yang disesuaikan dengan hasil analisis aktivitas dan pengguna. Kegiatan analisis ruang seperti analisis kebutuhan ruang, analisis sirkulasi ruang, analisis pencahayaan ruang, analisis penghawaan ruang dan analisis view dalam dan luar ruang.

4. Analisis Tapak

Analisis tapak yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang berada di lokasi tapak atau site. Analisis tapak berfungsi untuk mengetahui potensi dan kekurangan yang ada di tapak, yang nantinya akan mempermudah dalam proses desain.

5. Analisis Iklim

Analisis iklim yaitu sebuah tahapan dalam mengetahui kondisi alam yang berada di tapak dan sekitarnya. Analisis iklim dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung sebuah perancangan. Analisis iklim meliputi curah hujan, kecepatan angin, temperatur udara serta kelembapan.

6. Analisis Bentuk

Analisis bentuk dilakukan untuk menemukan bentuk bangunan yang sesuai dengan pendekatan desain yang sudah ditentukan. Dalam prosesnya, analisis bentuk mempertimbangkan lingkungan sekitar, keadaan iklim serta teknologi yang akan diaplikasikan pada bangunan. Analisis bentuk juga mempertimbangkan hasil dari analisis-analisis sebelumnya dari analisis tapak hingga analisis ruang, agar mendapat kesinambungan antara bentuk bangunan dengan bagian dalam bangunan. Analisis bentuk nantinya akan mempengaruhi tampilan atau fasad bangunan.

7. Analisis Struktur

Analisis struktur akan disesuaikan dengan bentuk yang didapat dari analisis bentuk. Analisis struktur mengacu pada studi literatur serta pendekatan yang dipakai. Analisis struktur harus mempertimbangkan kekuatan tetapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan. Analisis struktur berisi seperti system struktur utama, dinding, kolom, balok, atap serta bahan yang digunakan.

8. Analisis Utilitas

Analisis utilitas terkait dengan keberlangsungan, kenyamanan serta keamanan dari bangunan itu sendiri. Analisis utilitas meliputi utilitas bangunan dan lingkungan atau kawasan sekitar. Analisis yang dilakukan seperti sistem penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, sistem drainase, system pembuangan sampah, serta system mekanikal dan elektrikal.

- Tahap Sintesis

Tahap sintesis merupakan lanjutan dari tahap analisis. Di tahap ini, berisi konsep untuk menyelesaikan masalah yang didapat dari hasil analisis lalu diaplikasikan ke bangunan dan kawasan. Isi tahapan ini sebagai berikut :

1. Konsep mengenai pola kegiatan dan aktivitas pelaku.
2. Konsep ruang yang berisi tentang kebutuhan, persyaratan serta penzoningan ruang.
3. Konsep bangunan yang berisi tentang bentuk dasar bangunan, filosofi bentuk, penentuan as bangunan serta tinggi bangunan.
4. Konsep teknologi yang berisi struktur dan konstruksi, utilitas bangunan dan kawasan serta bahan bangunan.
5. Konsep kawasan yang berisi kesimpulan dari analisis tapak seperti zoning kawasan, sirkulasi kawasan serta orientasi kawasan.

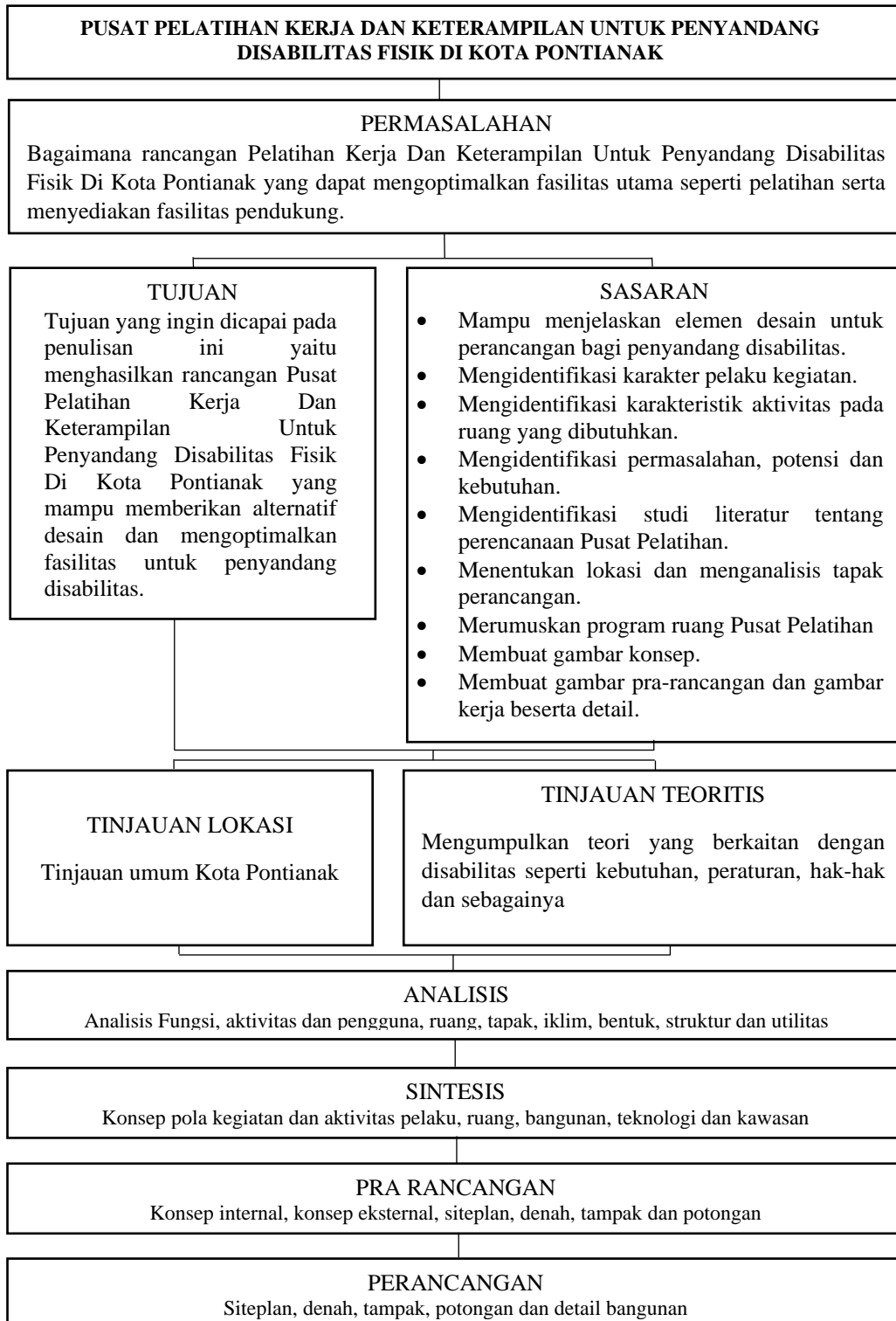
- Tahap Pra Rancangan

Tahap pra rancangan merupakan tahapan desain serta penerapan sintesis yang dimana berisi keputusan dalam pemecahan masalah desain yang masih bersifat sementara. Produk yang dihasilkan pada tahap ini yaitu konsep internal, konsep eksternal, siteplan, denah, tampak dan potongan perencanaan.

- Tahap Perancangan

Tahap perancangan merupakan tahap keputusan atau tahap final dari pemecahan masalah desain yang nantinya akan menjadi dasar bagi rancangan detail. Di tahap ini terdapat beberapa produk yang dihasilkan yaitu siteplan, denah, tampak dan potongan serta gambar detail bangunan.

1.6.4 Diagram Alur Perancangan



Sumber : Penulis, 2021

1.7 Sistematika Penulisan

Tahap penulisan laporan ini disusun dalam berbagai bab untuk memastikan penyajian laporan yang sistematis. Berikut perincian penyajian laporan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah, sistematika pembahasan, dan kerangka alur pemikiran serta keaslian penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan literatur sebagai penguat permasalahan tentang dasar-dasar teori, aturan dan hal-hal yang berkaitan atau mendukung untuk perancangan.

3. Bab III Landasan Konseptual

Memberikan analisis kajian secara mendalam seperti permasalahan, pendekatan teori tentang konsep perancangan yang bertujuan untuk menentukan solusi perancangan secara prinsip.

4. Bab IV Konsep Perancangan

Mengidentifikasi dan menjelaskan konsep perancangan. Identifikasi berupa solusi pemecahan masalah arsitektur dan hasil dari tahapan analisis yang menghasilkan konsep perancangan.

5. Bab V Pra Perancangan

Berisi tentang deskripsi dari hasil transformasi rancangan dari konsep perancangan sebelumnya. Konsep ini diimplementasikan menjadi gambar pra rancangan.